

# JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 01 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I1.3251](https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3251)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 05 Februari 2025 Accepted : 13 Februari 2025 Published : 17 Februari 2025

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KELURAHAN CIBEBER KECAMATAN CIMahi SELATAN KOTA CIMahi

Dewi Febriyanti<sup>1)</sup>, Dadan Kurnia<sup>2)</sup>, Dahly Sukmapryandhika<sup>3)</sup>

1, 2, 3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Ahmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini berjudul “Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi”. Masalah utama yang dihadapi adalah tingginya kasus *stunting*, yang ditandai dengan kurangnya berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) pada balita. Pada tahun 2022, tercatat 3.036 balita mengalami *stunting* (9,7% dari total balita), dan meskipun menurun menjadi 2.890 kasus pada April 2024, masalah ini masih menjadi perhatian serius. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan informan dari pemerintah setempat, kota, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan dalam dimensi collaborative governance. Pada dimensi face-to-face dialogue, penyuluhan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Dalam trust building, belum ada jaminan keberlanjutan bantuan makanan bergizi setelah program selesai. Pada commitment to process, partisipasi masyarakat dengan kesadaran gizi rendah masih terbatas. Dalam shared understanding, beban kerja tinggi dan kurangnya pemahaman bersama mengurangi efektivitas kolaborasi. Sementara itu, intermediate outcomes menunjukkan bahwa intervensi *stunting* memerlukan waktu panjang untuk melihat hasil. Meskipun terdapat tantangan, pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak menunjukkan potensi baik dalam meningkatkan status gizi anak dan mengurangi angka *stunting*.

**Kata Kunci:** Collaborative Governance, Stunting, Kelurahan Cibeber.

### Abstract

This research is entitled ‘Collaborative Governance in Handling Stunting in Cibeber Village, South Cimahi District, Cimahi City’. The main problem faced is the high number of Stunting cases, which is characterised by a lack of body weight (BW) and height (TB) in toddlers. In 2022, 3,036 toddlers were stunted (9.7% of the total toddlers), and although it decreased to 2,890 cases in April 2024, this problem is still a serious concern. This research used a descriptive method with a qualitative approach, involving informants from the local government, city, and community. Data collection techniques included literature review, observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed several challenges in the dimensions of collaborative governance. In the face-to-face dialogue dimension, extension services

*only reach a small part of the community. In trust building, there is no guarantee of the sustainability of nutritious food assistance after the programme is over. In commitment to process, the participation of communities with low nutrition awareness is still limited. In shared understanding, the high workload and lack of common understanding reduced the effectiveness of collaboration. Meanwhile, intermediate outcomes show that stunting interventions take a long time to see results. Despite the challenges, the collaborative approach involving various parties shows good potential in improving children's nutritional status and reducing stunting.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Stunting, Kelurahan Cibeber.

## PENDAHULUAN

*Stunting* merupakan kondisi serius yang terjadi ketika anak-anak di bawah usia lima tahun mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Masalah ini dimulai sejak sebelum kelahiran dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup individu. Menurut UNICEF (2019), *stunting* dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, pendidikan, sanitasi, dan akses terhadap layanan kesehatan. Di Indonesia, *stunting* menjadi masalah kesehatan yang serius, dengan prevalensi mencapai 30,8% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Meskipun angka ini menurun menjadi 21,6% pada tahun 2022, upaya penanganan masih diperlukan untuk mencapai target global, yaitu pengurangan prevalensi *stunting* hingga 14% pada tahun 2024 ([Stunting.go.id/stranas](http://Stunting.go.id/stranas)).

Di Kota Cimahi, prevalensi *stunting* pada tahun 2022 mencapai 9,7%, dengan 3.036 balita mengalami kondisi ini. Meskipun terjadi penurunan menjadi 2.890 kasus pada April 2024, upaya penanganan *stunting* masih menjadi prioritas. Pemerintah Kota Cimahi telah mengimplementasikan berbagai program, termasuk pemberian makanan tambahan, pendampingan ibu hamil, dan peningkatan sanitasi. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya masih menghambat efektivitas program.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. *Collaborative governance* melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan, kesulitan,

dan upaya yang telah dilakukan dalam penanganan *stunting*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menangani *stunting*.

Penelitian ini mengacu pada sejumlah studi terdahulu yang relevan dengan konsep tata kelola yang baik, khususnya dalam konteks penanganan *stunting*. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Misalnya, penelitian oleh Ipan (2016) mengevaluasi kolaborasi dalam penanganan *stunting* di UPTD Puskesmas Ciampel, yang menunjukkan efektivitas kolaborasi dalam menurunkan kasus *stunting*. Sementara itu, Latu (2017) mendeskripsikan tantangan dalam kolaborasi di Nusa Tenggara Timur, yang mencakup manajemen ketatalaksanaan yang belum berjalan dengan baik. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa manajemen kelembagaan kurang efisien dalam mengatasi masalah *stunting* di daerah tersebut. Dan Salsabilla (2017) menyoroti pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dalam penanganan *stunting* di Kota Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam tata kelola terkait penanganan *stunting* melibatkan beberapa unsur penting, termasuk partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam pengaturan penyelesaian masalah publik.

Meskipun terdapat kesamaan dalam fokus penelitian, perbedaan terletak pada lokasi dan konteks spesifik yang diteliti. Penelitian ini lebih terfokus pada penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang memberikan konteks lokal yang berbeda dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya.

Dalam tinjauan pustaka, kolaborasi didefinisikan sebagai kerja sama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dalam konteks pemerintahan. Menurut Ansell dan Gash (2008), kolaborasi melibatkan partisipasi aktif dari berbagai aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam pengambilan keputusan. Ini menciptakan ruang bagi dialog dan pertukaran informasi yang konstruktif. Tysara (2022) mengidentifikasi tiga jenis kolaborasi: primer, sekunder, dan tertier, yang masing-masing memiliki karakteristik dan konteks yang berbeda. Kolaborasi primer melibatkan kelompok yang bersatu dengan sungguh-sungguh,

sedangkan kolaborasi sekunder ditandai dengan struktur yang terorganisir dan spesifik. Kolaborasi tertier, di sisi lain, sering kali dipicu oleh konflik yang bersifat laten.

Terdapat beberapa kolaborasi pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Business*), dan G2C (*Government to Citizen*), dan kolaborasi ini merupakan cara untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan masalah publik. G2G mencakup interaksi antara pemerintah dengan pemerintah lain, sedangkan G2B melibatkan hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis. Dan G2C berfokus pada interaksi antara pemerintah dan warga negara dalam memberikan layanan publik secara langsung. Dengan memanfaatkan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan dapat tercapai solusi yang lebih relevan dan efektif untuk masalah yang kompleks seperti *Stunting*.

Perlu diketahui bahwa *stunting*, sebagai isu kesehatan, didefinisikan sebagai kekurangan gizi yang berkelanjutan yang berdampak pada pertumbuhan anak. Menurut Kementerian Kesehatan (2022), *stunting* dapat dimulai sejak dalam rahim dan berlanjut hingga anak berusia dua tahun. Ini menunjukkan pentingnya intervensi gizi yang tepat sejak dini untuk mencegah masalah ini. Diantara faktor penyebab *stunting* meliputi asupan gizi yang tidak memadai, kesehatan ibu, sanitasi, dan pendidikan masyarakat. Pencegahan *stunting* dapat dilakukan dengan memastikan pemenuhan gizi selama kehamilan, memberikan ASI eksklusif, serta menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan *stunting* memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Pendekatan itu diantaranya melalui program pemerintah seperti Program Gizi Nasional dan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi berfokus pada upaya penanggulangan *stunting* melalui intervensi yang spesifik dan sensitif terhadap isu gizi. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil dan balita.

Dan melalui penelitian ini, dapat menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan masyarakat dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber. Melalui Teori Ansell dan Gash (2007) yang digunakan sebagai dasar untuk

menganalisis proses kolaborasi, yang mencakup 5 dimensi yang terdiri dari *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust building* (pembangunan kepercayaan), *commitment to process* (komitmen terhadap proses), *share understanding* (berbagi pemahaman), dan *intermediate outcomes* (hasil). Teori tersebut didasarkan atas asumsi yang diambil berkaitan dengan pentingnya kolaborasi, pengaruh faktor-faktor penyebab *Stunting*, dan relevansi teori dalam konteks penelitian. Asumsi ini mencerminkan keyakinan bahwa kolaborasi yang efektif dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam penanganan masalah *stunting*.

Melalui teori tersebut akan terurai variabel penelitian yang dioperasionalisasikan melalui beberapa indikator yang mencakup dialog, kepercayaan, efektivitas program, kolaborasi, dan hasil akhir dari upaya penanganan *stunting*. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas kolaborasi dalam penanganan *stunting*. Sehingga dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga pada dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi status gizi anak. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi? Apakah tantangan dan kesulitan yang ada dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi? Dan apa sajakah upaya yang telah dilakukan dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi?

Selanjutnya, perlunya penelitian ini dilaksanakan agar berupaya dalam memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kebijakan dan praktik kolaborasi dalam penanganan masalah kesehatan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkap, menganalisis, dan menafsirkan permasalahan terkait tata kelola kolaboratif dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Subjek penelitian adalah Puskesmas Cibeber, dengan informan yang meliputi Dinas Kesehatan Kota Cimahi, perangkat Kelurahan Cibeber, pihak Puskesmas, dan keluarga penderita *stunting*. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka (Sugiyono, 2018).

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling untuk memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Variabel yang diukur mencakup kolaborasi dalam penanganan *stunting*, dianalisis melalui dimensi seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap proses. Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka, observasi, dan analisis dokumen, dengan analisis data dilakukan secara deskriptif mengikuti tahapan yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (1984).

Rencana pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selama periode Februari hingga Juni 2024, dengan harapan memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan *stunting* melalui tata kelola kolaboratif (Darmadi, 2011).

## **PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebagai lokus penelitian yaitu Kelurahan Cibeber, yang terletak di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan Kota Cimahi itu sendiri. Awalnya, wilayah ini dikenal sebagai kawasan militer pada masa kolonial Belanda dan berkembang pesat menjadi daerah perkotaan pasca-kemerdekaan Indonesia. Cibeber merasakan dampak

signifikan dari urbanisasi, yang turut membawa perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Selain perkembangan fisik dan infrastruktur, kelurahan ini juga dikenal dengan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya. Seiring dengan upaya pemerintah Kota Cimahi, Cibeber berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui berbagai program pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Sejak tahun 2013, kelurahan ini telah dipimpin oleh berbagai lurah, dengan masing-masing memiliki kontribusi dalam memajukan wilayah ini, hingga saat ini dipimpin oleh Bapak Bambang Wahyu Purwasto yang menjabat pada periode 2023-2025.

Visi Kelurahan Cibeber adalah "Mewujudkan Kelurahan Cibeber yang Sejahtera dan Berdaya Saing" yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Misi yang mengiringinya meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, dorongan terhadap partisipasi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui misi-misi ini, kelurahan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Salah satu aspek penting dalam upaya ini adalah pengembangan infrastruktur yang mencakup jalan, fasilitas publik, dan program pelatihan guna meningkatkan keterampilan masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan.

Kelurahan Cibeber memiliki posisi geografis yang strategis di wilayah barat Kota Cimahi, dengan batas wilayah yang jelas di sekelilingnya, termasuk dengan Kelurahan Cibabat di utara, Kelurahan Cipageran di selatan, dan beberapa kelurahan lainnya di timur dan barat. Wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi, dengan sebagian besar area berada pada ketinggian antara 600 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Karakteristik topografi ini berpengaruh pada pengembangan wilayah, di mana daerah dataran rendah lebih cocok untuk pertanian dan pembangunan infrastruktur, sedangkan wilayah berbukit memerlukan perhatian lebih dalam hal kestabilan tanah dan mitigasi bencana.

Selain itu, Cibeber juga memiliki potensi alam yang mendukung pariwisata dan rekreasi, dengan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, menjadikannya kawasan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Keberagaman topografi ini juga turut membentuk pola hidup masyarakat, dengan penduduk yang tinggal di dataran lebih terlibat dalam sektor perdagangan dan industri kecil, sementara yang tinggal di kawasan berbukit lebih bergantung pada pertanian.

### **Dimensi *Face to Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)**

Dimensi *face to face dialogue* dalam penanganan *stunting*, khususnya di Puskesmas Cibeber, menunjukkan bahwa dialog tatap muka merupakan metode yang efektif dalam membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan penyuluhan berbasis komunitas yang dilakukan oleh Puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pencegahan *stunting*. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan waktu dan jarak yang menghambat partisipasi penuh masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Pada sisi lain, *collaborative governance* melalui dialog antara berbagai pemangku kepentingan, seperti Puskesmas, Kelurahan, Dinas Kesehatan, dan masyarakat, sangat penting dalam mewujudkan penurunan angka *stunting*. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait memungkinkan pengidentifikasi masalah dengan lebih tepat dan penyusunan solusi yang sesuai. Meskipun demikian, kendala seperti perbedaan kepentingan dan hambatan komunikasi terkadang mengurangi efektivitas dialog ini. Keberhasilan dalam kolaborasi dan dialog yang berkelanjutan dapat mendukung implementasi program lintas sektor yang lebih efektif, yang berujung pada penurunan angka *stunting* yang lebih signifikan.

Pentingnya keberlanjutan dialog antara berbagai pemangku kepentingan ini menjadi kunci dalam mencapai target penurunan prevalensi *stunting* dan peningkatan kesadaran gizi keluarga. Dengan kerja sama yang terjalin, diharapkan program ini dapat diterapkan secara lebih menyeluruh dan berdampak positif terhadap penurunan *stunting* di wilayah Cibeber.

Salah satunya, sebagaimana Puskesmas Cibeber tidak hanya mampu berkolaborasi, juga mampu mengadakan dialog dengan PKK terutama Pokja IV yang merupakan bagian dari TP PKK Kota Cimahi yang dikoordinir oleh Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Pilot Project yang pertama dari sembilan program tersebut yaitu peningkatan kesadaran Gizi di dalam keluarga agar mampu mencegah dan menurunkan angka *stunting*.

### **Dimensi *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)**

Kepercayaan antar pemangku kepentingan, seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, masyarakat, dan lembaga lainnya, sangat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi. Tanpa adanya trust building yang kuat, kolaborasi yang efektif akan sulit tercapai. Kepercayaan ini memungkinkan adanya komunikasi yang terbuka, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta koordinasi yang lebih efisien antara berbagai pihak yang terlibat. Program penanggulangan *stunting* yang efektif memerlukan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, yang menjadi dasar bagi implementasi kebijakan kesehatan yang tepat sasaran.

Puskesmas Cibeber telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi yang seimbang dan pencegahan *stunting*. Beberapa program yang dijalankan antara lain kunjungan rumah, pendampingan PMT ASI (Pemberian Makanan Tambahan ASI), PMT Lokal, serta penyuluhan di Posyandu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pola makan yang sehat, pentingnya ASI eksklusif, dan cara-cara untuk menjaga tumbuh kembang anak. Salah satu langkah strategis yang juga dilakukan adalah Lokakarya Mini Lintas Sektoral, di mana berbagai pihak berkumpul untuk mencari solusi terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi, termasuk *stunting*. Ini menunjukkan komitmen Puskesmas dalam memperluas kolaborasi dan melibatkan berbagai sektor terkait untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat.

Meskipun berbagai program yang dilakukan oleh Puskesmas Cibeber memiliki kelebihan, ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Kelebihan yang paling terlihat adalah peningkatan keterorganisasian dalam strategi penanganan *stunting* melalui pendekatan lintas sektor. Kunjungan rumah dan pendampingan yang dilakukan oleh Puskesmas menunjukkan komitmen mereka dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, serta memberikan perhatian lebih terhadap keluarga yang membutuhkan. Namun, salah satu kendala utama adalah ketidakmerataan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Tidak semua keluarga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya gizi, sehingga mempengaruhi implementasi program di lapangan. Selain itu, ada kecenderungan masyarakat untuk bergantung pada program pemerintah tanpa inisiatif mandiri untuk mengatasi masalah kesehatan di tingkat rumah tangga.

Dinas Kesehatan Kota Cimahi telah berkolaborasi dengan Puskesmas dan Posyandu untuk menurunkan angka *stunting* melalui berbagai program edukasi, penyuluhan, dan pemberian bantuan nutrisi. Dalam upaya ini, Posyandu dioptimalkan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2024 sebagai lembaga strategis untuk pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan *stunting*. Posyandu memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya gizi dan kesehatan kepada ibu dan anak, serta dalam pemantauan status gizi masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti kader kesehatan dan masyarakat lokal, program-program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting* dengan lebih efektif.

Meskipun sudah ada berbagai inisiatif, tantangan terbesar yang dihadapi dalam penanganan *stunting* adalah aksesibilitas program yang belum merata. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari Posyandu atau pusat layanan kesehatan lainnya, keterbatasan ini dapat mengurangi efektivitas intervensi. Selain itu, keberlanjutan asupan gizi setelah intervensi awal juga menjadi masalah yang perlu perhatian lebih. Untuk itu, perlu adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif, yang dapat memastikan bahwa dampak dari intervensi tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Pemantauan yang berkelanjutan akan membantu

mengidentifikasi kesenjangan dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Upaya penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber juga melibatkan pendekatan collaborative governance yang mencakup berbagai perangkat daerah dan lembaga kesehatan. Penanganan *stunting* tidak hanya bergantung pada aspek gizi, tetapi juga faktor-faktor lain seperti sanitasi, akses air bersih, pendidikan, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menangani *stunting* secara holistik dan menyeluruh. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan peran serta masyarakat dan berbagai instansi, agar hasil yang dicapai optimal. Melalui kolaborasi ini, masalah *stunting* dapat diatasi dengan lebih efektif, dengan memastikan setiap aspek yang mempengaruhi kesehatan masyarakat ditangani secara bersama-sama dan sinergis.

### **Dimensi Commitmen to Process (Komitmen terhadap Proses)**

Penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui penerapan *collaborative governance*. Meskipun target “zero *stunting*” masih belum tercapai, komitmen dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Puskesmas, Posyandu, PKK, dan masyarakat, telah membawa hasil. Program “Strategi Penurunan *stunting* dengan Formula 3-1-2” yang berfokus pada pemberian makanan tambahan dan pemantauan gizi balita memberikan dampak positif meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Kendala utama yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat yang rendah mengenai pentingnya gizi, keterbatasan akses gizi, serta minimnya kapasitas tenaga kesehatan dan kader yang menjadi penghambat efektivitas program.

Pentingnya komitmen terhadap proses penanganan *stunting* tercermin dari kolaborasi yang erat antara berbagai sektor yang saling mendukung satu sama lain. Meskipun sudah ada kemajuan, tantangan dalam implementasi yang melibatkan berbagai pihak tetap ada, seperti ketidakmerataan distribusi akses program dan sumber daya terbatas. Oleh karena itu, evaluasi

berkelanjutan serta peningkatan kapasitas penyuluhan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempercepat penurunan angka *stunting* secara signifikan.

Selain itu, penerapan Pedoman Pelaksanaan Intervensi *stunting* Terintegrasi, yang merupakan standar nasional dalam penurunan *stunting*, telah memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Dengan strategi yang melibatkan intervensi gizi spesifik pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta pendekatan multi-sektor, penurunan *stunting* di Kota Cimahi dapat lebih terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Namun, penguatan sektor non-kesehatan, seperti akses pangan bergizi, sanitasi yang lebih baik, dan perbaikan lingkungan, juga menjadi faktor penentu yang harus diperhatikan lebih lanjut.

Pemerintah Kota Cimahi bersama Dinas Kesehatan dan lembaga terkait lainnya, melalui Program Rembuk *Stunting* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, berkomitmen untuk memastikan keberhasilan program penurunan *stunting*. Untuk itu, perlu adanya pemantauan yang lebih sistematis dan evaluasi yang lebih konsisten untuk mengidentifikasi hasil yang lebih optimal. Kolaborasi lintas sektor dengan peningkatan akses ke layanan gizi yang berkualitas dan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat akan sangat berpengaruh dalam mencapai target penurunan *stunting* yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang tersedia hingga tahun 2024, upaya penurunan angka *stunting* di Kota Cimahi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2022, tercatat 3.036 balita mengalami *stunting*, dengan prevalensi 9,70%. Angka ini menurun menjadi 2.890 balita pada tahun 2023, setara dengan prevalensi 9,4%. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi *stunting* hingga 14%.

Meskipun data spesifik untuk tahun 2025 belum tersedia, tren penurunan yang konsisten menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah *stunting*. Upaya ini melibatkan berbagai program intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target penurunan prevalensi *stunting* yang lebih rendah di masa mendatang.

### **Dimensi *Share Understanding* (Berbagi Pemahaman)**

Penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi menunjukkan pentingnya kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Puskesmas Cibeber, dan masyarakat. Dimensi *shared understanding* atau berbagi pemahaman merupakan kunci dalam memastikan kesuksesan program yang dijalankan. Pemahaman yang sama mengenai tujuan dan peran masing-masing pihak dalam penanganan *stunting* memperkuat sinergi dan mencegah terjadinya konflik dalam pelaksanaan program. Kolaborasi ini tercermin dalam berbagai inisiatif, seperti penguatan peran Puskesmas dalam memberikan pembinaan kepada Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM), serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kesehatan di tingkat kelurahan.

Namun, meskipun terdapat kemajuan dalam implementasi kolaborasi, beberapa kendala masih perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk yang cukup tinggi, yaitu 1:43.134, jauh dari target yang ideal, yakni 1:16.000. Hal ini menyebabkan beban kerja yang berat bagi tenaga kesehatan, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Selain itu, meskipun sudah ada sistem pemantauan dan evaluasi, tantangan dalam pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu menjadi hambatan dalam mengukur efektivitas program secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, kolaborasi yang terjalin antara Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan masyarakat dalam penanganan *stunting* telah berjalan dengan baik, dengan adanya pembinaan, pendampingan, dan rujukan untuk penanganan kasus *stunting* yang lebih serius. Meski demikian, penguatan sumber daya dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan serta evaluasi yang lebih efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program penurunan *stunting* dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Tabel 1: Rasio Puskesmas terhadap Penduduk di Kota Cimahi

Tahun	Jumlah Puskesmas	Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas terhadap Penduduk
2023	13	561.766	1:43.134

Sumber: Puskesmas Cibeber, Kota Cimahi

Tabel ini menggambarkan rasio Puskesmas terhadap penduduk di Kota Cimahi pada tahun 2023, yang jauh di bawah target ideal. Hal ini menunjukkan tantangan dalam distribusi layanan kesehatan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program penanganan *stunting* di wilayah tersebut.

### **Dimensi *Intermediate Outcomes* (Hasil)**

Dimensi *intermediate outcomes* dalam kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Puskesmas Cibeber, dan masyarakat setempat berfokus pada hasil yang dicapai dalam penanganan *stunting*. Di Kelurahan Cibeber, meskipun ada kemajuan signifikan dalam meningkatkan status gizi balita, hasil dari program-program yang dilaksanakan masih perlu perhatian lebih. Data dari aplikasi porting menunjukkan bahwa sebagian besar bayi di Kelurahan Cibeber memiliki status gizi yang baik, dengan 84,17% bayi memiliki berat badan normal dan 88,88% memiliki tinggi badan normal. Namun, tantangan besar masih ada pada bayi dengan status gizi buruk atau risiko *stunting*, dengan 2,32% bayi mengalami tinggi badan sangat pendek dan 8,66% memiliki tinggi badan pendek. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian ekstra terhadap kelompok risiko tinggi meskipun sebagian besar populasi bayi terpantau sehat.

Program seperti pemberian Program Makanan Tambahan (PMT), tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, dan pengobatan cacing bagi balita menunjukkan potensi besar dalam memperbaiki status gizi anak, namun perubahan signifikan dalam pertumbuhan tinggi badan memerlukan waktu. Penanganan *stunting* bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek, melainkan sebuah proses yang membutuhkan intervensi berkelanjutan dengan pengawasan ketat. Kolaborasi lintas sektor yang

melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan masyarakat, sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam implementasi program dan mencapai target penurunan *stunting* yang optimal.

Melalui penggunaan aplikasi porting yang terintegrasi, data status gizi balita dapat dipantau secara akurat dan terperinci, yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik dalam merancang kebijakan dan intervensi selanjutnya. Keberlanjutan program, sinergi antar instansi terkait, serta optimisasi implementasi program menjadi faktor kunci dalam menekan angka *stunting* di Kelurahan Cibeber dan mencapai target *zero stunting* di masa depan.

Tabel 2: Status Gizi Balita di Kelurahan Cibeber

Kategori	Jumlah Bayi (Balita)	Percentase (%)
Berat Badan Sangat Kurang	12	0.84
Berat Badan Kurang	92	6.47
Berat Badan Normal	1,196	84.17
Resiko Berat Badan Lebih	121	8.52
<b>Total Bayi Terdata</b>	<b>1,421</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Cimahi, Kota Cimahi, Tahun 2024

Tabel ini menggambarkan status gizi bayi berdasarkan berat badan di Kelurahan Cibeber. Meskipun sebagian besar bayi terdata memiliki berat badan normal, kelompok dengan berat badan kurang tetap memerlukan perhatian lebih dalam intervensi untuk menurunkan angka *stunting* secara efektif.

### **Tantangan dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi**

Penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan

perhatian serius dan pendekatan yang holistik. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi adalah:

1. Koordinasi dan Kolaborasi Multi-Pihak: Meskipun ada berbagai pihak yang terlibat, seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, PKK, dan masyarakat, perbedaan visi dan tujuan sering kali menghambat efektivitas program. Kolaborasi yang lebih terarah dan dialog yang teratur antar pihak sangat dibutuhkan;
2. Kendala dalam Penerapan Program: Program pemberian makanan tambahan (PMT) memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil, dan masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya kesabaran dan konsistensi dalam mengikuti program tersebut;
3. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Meskipun telah ada penyuluhan, tingkat partisipasi masyarakat, khususnya orang tua, dalam program *stunting* masih rendah. Pendekatan yang lebih interaktif dan kreatif, termasuk penggunaan media sosial, dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi;
4. Akses terhadap Data dan Informasi: Pemantauan yang berbasis data masih menghadapi kendala dalam akses dan validasi data. Pelatihan petugas kesehatan dalam pengumpulan data yang akurat dan kolaborasi dengan lembaga penelitian diharapkan dapat meningkatkan kualitas data;
5. Ketergantungan pada Pendekatan Jangka Panjang: *Stunting* memerlukan intervensi yang berkelanjutan sejak remaja hingga masa kehamilan. Program-program seperti pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja dan obat cacing untuk balita perlu dilaksanakan secara terus-menerus;
6. Keterbatasan Sumber Daya: Rasio Puskesmas yang tidak memadai dengan jumlah penduduk, serta keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, membatasi efektivitas program. Penguatan kapasitas Puskesmas dan Posyandu sangat diperlukan.

Tabel 3. Tantangan dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Cibeber

Tantangan	Deskripsi	Solusi yang Diharapkan
Koordinasi dan Kolaborasi Multi-Pihak	Perbedaan visi dan tujuan antar pihak yang terlibat	Dialog dan kolaborasi yang lebih terarah antar pihak
Kendala dalam Penerapan Program	PMT membutuhkan waktu untuk memberikan hasil instan	Edukasi tentang pentingnya kesabaran dan konsistensi
Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi rendah, penyuluhan tidak selalu diikuti	Pendekatan kreatif dan penggunaan media sosial untuk penyuluhan
Akses terhadap Data dan Informasi	Kendala dalam pengumpulan dan pengolahan data yang akurat	Pelatihan pengumpulan data dan kolaborasi dengan lembaga penelitian
Ketergantungan pada Pendekatan Jangka Panjang	Program jangka panjang membutuhkan komitmen yang berkelanjutan	Keterlibatan terus-menerus dari semua pihak
Keterbatasan Sumber Daya	Kekurangan tenaga kesehatan dan	Peningkatan kapasitas Puskesmas

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2024

Penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber memerlukan upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Dengan mengatasi berbagai tantangan ini melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, diharapkan angka *stunting* dapat diturunkan secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi kesehatan generasi mendatang.

### **Kesulitan dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi**

Dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa kesulitan utama yang dihadapi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melihat perubahan yang signifikan pada status gizi anak, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program penyuluhan, serta kesulitan koordinasi antar sektor terkait. Selain itu, keberlanjutan akses terhadap makanan bergizi setelah program selesai dan keterbatasan sumber daya di Puskesmas juga menjadi hambatan dalam penanganan *stunting*.

Penanganan *stunting* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang melibatkan kolaborasi dari berbagai pemangku

kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Keterlibatan orang tua sangat penting agar mereka dapat mendukung perubahan positif dalam keluarga mereka. Monitoring dan evaluasi yang baik juga diperlukan untuk menilai efektivitas program dan memastikan dampak jangka panjang.

Secara keseluruhan, penanganan *stunting* bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga kesehatan, tetapi juga tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama dari semua pihak. Dengan pendekatan terintegrasi, kesadaran kolektif, dan dukungan sosial yang kuat, diharapkan angka *stunting* di Kelurahan Cibeber dapat terus menurun dan anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan optimal.

### **Upaya Penanganan *Stunting* di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi**

Upaya penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber telah dilakukan dengan pendekatan komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor, intervensi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan meliputi:

#### **1. Penyuluhan dan Edukasi**

Penyuluhan Tatap Muka oleh Puskesmas Cibeber terkait pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pemberian makan bayi dan balita. Juga dengan diadakannya Kelas Konseling untuk orang tua mengenai pemberian makanan bergizi bagi anak.

#### **2. Pendampingan dan Intervensi Langsung**

Program Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan anak *stunting*, termasuk pemberian biskuit bergizi dan bahan makanan lokal. Mengenai kunjungan rumah untuk menjangkau sasaran yang tidak dapat hadir di Posyandu atau penyuluhan.

#### **3. Kolaborasi Lintas Sektor**

Kolaborasi Puskesmas dan PKK melalui program kesehatan keluarga. Ditambah dengan Rembuk *stunting* yang diadakan rutin untuk menyelaraskan visi dan strategi lintas sektor.

#### 4. Implementasi Program Standar Nasional

Melalui Formula 3-1-2: Pemberian makanan tambahan selama 15 hari dan evaluasi berkala Ditambah dengan 8 Aksi Konvergensi *stunting*: Pemantauan dan evaluasi berbasis data.

#### 5. Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Data

Aplikasi Porting untuk memantau status gizi dan perkembangan anak.

#### 6. Peningkatan Kapasitas Layanan Kesehatan

Pelatihan Tenaga Kesehatan untuk memperkuat layanan di Posyandu dan Puskesmas. Ditunjanga dengan Intervensi Gizi Sensitif untuk meningkatkan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan pangan bergizi.

#### 7. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Workshop dan Kampanye Digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

#### 8. Peran Aktif Remaja dan Calon Pengantin

Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri dan Elsimil untuk calon pengantin guna meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi dan gizi.

Adapun dampak dan hasil dalam penurunan angka *stunting* ternyata melalui berbagai upaya tersebut, masih ada penurunan angka *stunting* di Kota Cimahi dari 10,18% pada tahun 2021 menjadi 9,7% pada tahun 2022, yang menunjukkan efektivitas program meskipun masih perlu waktu untuk mencapai *zero stunting*.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, upaya penanganan *stunting* di Kelurahan Cibeber telah menggunakan pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan berbagai pihak seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kelurahan, dan masyarakat. Pendekatan ini dievaluasi berdasarkan dimensi dan indikator dari teori Ansell dan Gash (2007), dengan kelebihan dan kekurangannya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berkaitan dengan dimensi *face to face dialogue* (dialog tatap muka). Maka dilihat dari aspek kelebihannya, diantaranya dapat meningkatkan kepercayaan antara tenaga kesehatan dan masyarakat, serta memfasilitasi komunikasi langsung melalui penyuluhan dan konseling. Sedangkan kekurangannya adalah akses terbatas pada sebagian kecil masyarakat dalam

satu sesi penyuluhan, serta rendahnya kehadiran yang mengurangi efektivitas program.

Berkaitan dengan dimensi *trust building* (membangun kepercayaan), terdapat kelebihan, diantaranya terwujudnya program seperti PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan ASI eksklusif memberikan informasi langsung dan dukungan nyata untuk meningkatkan status gizi anak, dengan pendekatan holistik melalui kolaborasi lintas sektoral. Sedangkan kekurangannya adalah kurangnya keberlanjutan dalam pengadaan makanan bergizi setelah program berakhir, dan kesadaran masyarakat yang belum optimal.

Berkaitan dengan dimensi *commitment to process* (komitmen terhadap proses) terdapat kelebihan, diantaranya adalah terwujudnya program seperti Formula 3-1-2 yang melibatkan banyak pihak dan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) berhasil menciptakan kolaborasi lintas sektor yang efektif. Sedangkan kekurangannya adalah kesadaran rendah pada beberapa kelompok masyarakat mengenai pentingnya gizi, dan keberlanjutan gizi yang baik setelah periode intervensi yang terbatas.

Berkaitan dengan dimensi *shared understanding* (Berbagi Pemahaman) terdapat kelebihan diantaranya yaitu pemahaman yang sama antara pihak terkait seperti Puskesmas dan Kelurahan mengenai tujuan penanganan *stunting* dan peran masing-masing dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kekurangan: Ketergantungan pada satu pihak dan ketidakmerataan pemahaman antara pihak yang terlibat, disertai dengan beban kerja tinggi di Puskesmas yang mengurangi efektivitas kolaborasi.

Berkaitan dengan dimensi *intermediate outcomes* (hasil sementara) terdapat kelebihan diantaranya adalah penggunaan aplikasi porting yang terintegrasi dengan sistem nasional memungkinkan pengumpulan data *real-time* dan memfasilitasi evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program. Sedangkan kekurangannya adalah hasil jangka panjang yang tidak langsung terlihat, serta kendala koordinasi antar pemangku kepentingan yang dapat menimbulkan tantangan operasional.

Dan selanjutnya, meskipun ada tantangan dalam hal partisipasi masyarakat, keberlanjutan program, dan koordinasi antar pemangku kepentingan, *Collaborative Governance* dalam penanganan *Stunting* di Kelurahan Cibeber menunjukkan potensi yang baik. Kolaborasi antara Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kelurahan, dan masyarakat berhasil meningkatkan status gizi anak-anak, meskipun perbaikan dalam aspek partisipasi dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya gizi sangat diperlukan untuk keberhasilan jangka panjang. Dengan dukungan praktis dan evaluasi berbasis data yang terintegrasi, upaya ini dapat terus berlanjut untuk mengurangi angka *Stunting* di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

- Bappenas. (2018). Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan *Stunting* terintegrasi di kabupaten/kota. Jakarta: Bappenas.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.
- Dinkes, C. (2022). Profil Kesehatan Tahun 2022. Pemerintah Kota Cimahi Dinas Kesehatan.
- Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times. Princeton University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2013). Managing to collaborate: The theory and practice of collaborative advantage. Routledge.
- Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative governance dalam penanganan *Stunting*. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(3), 383–391.
- Latu, F. A. (2017). Collaborative governance dalam upaya penanggulangan masalah *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Universitas Nusa Cendana.
- Mentang, J. J., Rumayar, A. A., & Kolibu, F. K. (2018). Hubungan Antara Kualitas Jasa Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien Di Puskesmas Taratara Kota Tomohon. *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 7(5).
- Moon, M. J. (2002). The evolution of e-government among municipalities: Rhetoric or reality? *Public Administration Review*, 62(4), 424–433.
- O'Leary, R. (2010). Collaborative Governance: A New Approach to Public Management.
- Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019. (2019).
- Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2016. (n.d.).

- PPID. (2024). Berbagai Upaya dalam Menurunkan Tingkat Prevalensi *Stunting* di Kota Cimahi. PPID Kota Cimahi.  
<https://ppid.cimahikota.go.id/artikel/dinas-kesehatan-berbagai-upaya-dalam-menurunkan-tingkat-prevalensi-Stunting-di-kota-cimahi>
- Rahadhyan, A. (2023). Pemkot Cimahi Launching Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Dengan Formula 3-1-2. Pemkot Cimahi.  
<https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1359-pemkot-cimahi-launching-strategi-percepatan-penurunan-Stunting-dengan-formula-3-1-2>
- Saleh, C. (2020). Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi. Pustaka Universitas Terbuka, 1.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In Alfabeta, Bandung. Alfabeta.
- Syafie, I. K. (2014). Ilmu Pemerintahan. Bumi aksara.
- Tysara, L. (2022). 11 Pengertian Kolaborasi Menurut Para Ahli, Simak Jenis-jenisnya. Liputan6.Com.  
<https://www.liputan6.com/hot/read/4852462/11-pengertian-kolaborasi-menurut-para-ahli-simak-jenis-jenisnya>.